

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai sektor yang berperan penting untuk mengembangkan dan memberikan kontribusi terhadap Negara adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata nasional memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara, penyerapan angkatan kerja, sumber pendapatan asli daerah serta investasi untuk pengembangan usaha masyarakat yang banyak terdapat di daerah-daerah wisata. Dengan demikian, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu untuk menghidupkan ekonomi dalam sebuah negara.

Pasca pandemi *Covid-19* yang melanda hampir seluruh negara di dunia, mengakibatkan terjadinya penurunan pengembangan sektor pariwisata yang berdampak pada lemahnya pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Saat ini, sektor pariwisata kembali menjadi instrumen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global serta untuk penciptaan dan pengembangan lapangan kerja baru sesuai dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah untuk kemudian dilaksanakan pengelolaan. potensi yang dimaksud baik berupa wisata budaya, wisata religi, wisata alam dan wisata buatan dan lain sebagainya.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tiap daerah memiliki potensi pariwisata yang harus digali, diolah, dikembangkan serta dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terkait dengan rekreasi dan sarana hiburan. Dengan demikian pengelolaan sektor pariwisata yang baik mampu untuk menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

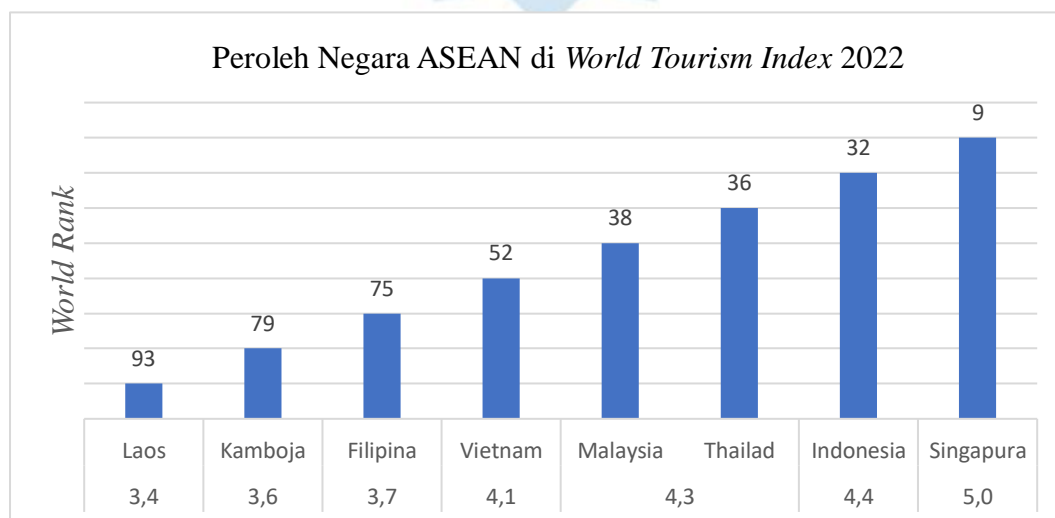
Sebagai salah satu sektor strategis, maka sektor pariwisata harus dikelola dan dimanfaatkan serta terus dibangun sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk terus meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mengangkat

kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata pada gilirannya akan menciptakan kegiatan produksi barang dan jasa karena adanya permintaan atau investasi.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang sangat beragam. Baik kekayaan budaya, flora dan fauna menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia cukup tinggi dimana hal ini mempengaruhi keragaman sektor pariwisata yang dimiliki. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sebuah negara.

Berdasarkan laporan *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)* pada tahun 2022, menyebutkan bahwa peringkat pariwisata yang dimiliki Indonesia terus mengalami kenaikan, hanya dalam waktu 18 Bulan Indonesia menempati urutan ke 32, dimana pada sebelumnya berada pada urutan 44 Pada tahun 2021 sebagaimana gambar berikut:

Grafik 1.1 Grafik Peringkat Pariwisata Negara-Negara ASEAN di Dunia Tahun 2022



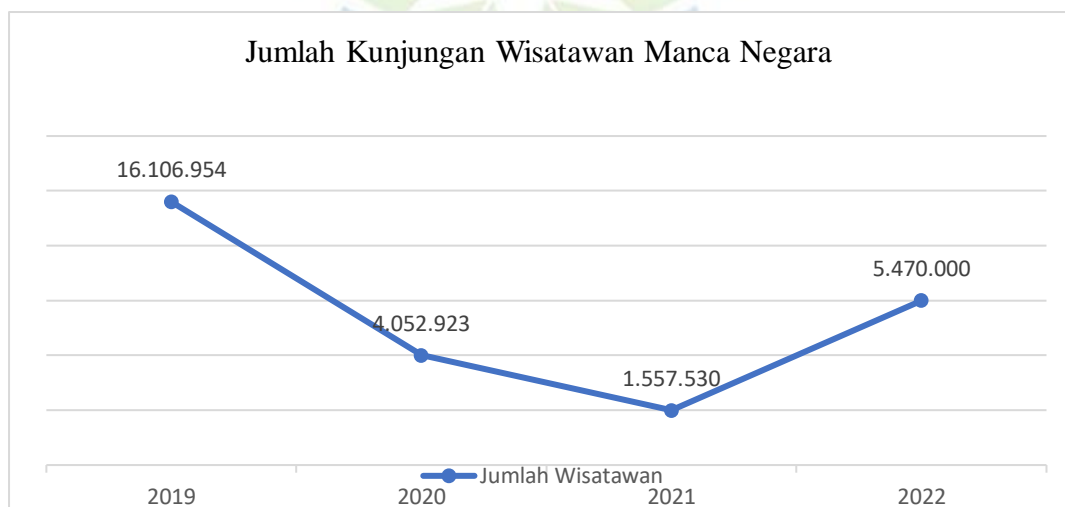
Sumber : Travel and Tourism Development Index

Indonesia naik 12 peringkat dan untuk pertama kalinya Indonesia berada di atas Negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam dari total 117 negara yang masuk dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* dengan nilai sebesar 4,4 point

lebih bawah dari negara Singapura yang telah memperoleh nilai sempurna yakni 5,0 point.

Berdasarkan pada hal tersebut maka mengindikasikan sektor pariwisata dalam beberapa waktu kedepan akan terus berkembang. Sementara berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018-2021 telah mencatat jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang diakibatkan oleh adanya wabah pandemi covid-19 dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 16.106.954, dan terus menurun pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.0520.923 yang menunjukkan penurunan secara drastis sampai pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.557.539. Akan tetapi pada tahun 2022 perlahan mengalami kenaikan sebanyak 3.912.4270 wisatawan sebagaimana gambar berikut ini.

Grafik 1.2 Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara Tahun 2019-2022

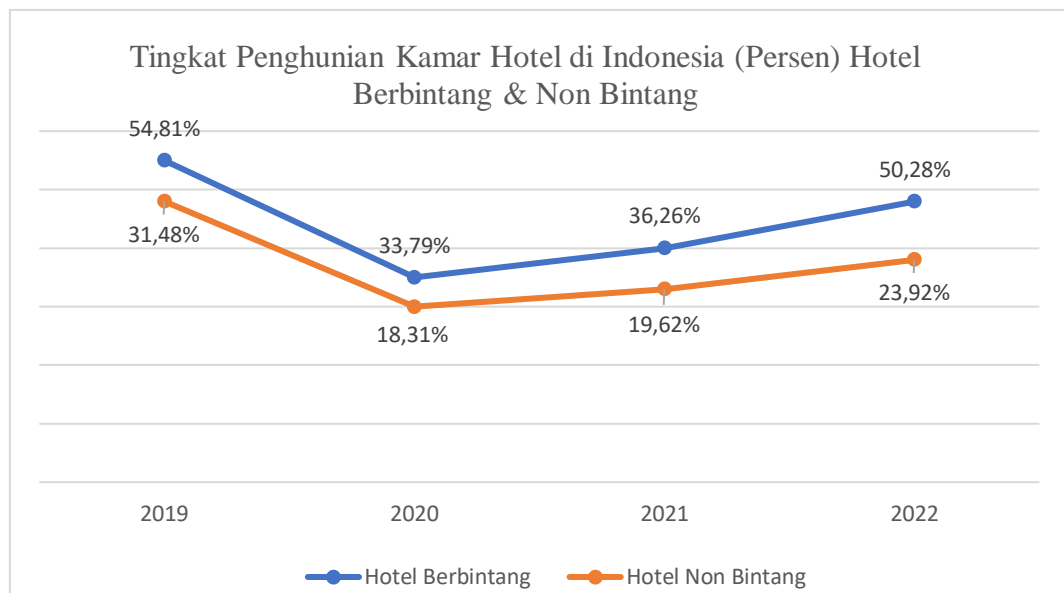


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Angka tersebut menunjukkan *trend* kenaikan yang sangat tajam dibandingkan periode-periode sebelumnya. Adapun untuk 3intang penghunian kamar hotel atau okupansi hotel baik berbintang maupun non 3intang pada tahun 2019-2022 juga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya wabah pandemi covid-19

dan pada tahun 2022 berangsur mengalami peningkatan sebagaimana gambar berikut ini.

Grafik 1.3 Grafik Tingkat Penghunian Kamar di Indonesia Hotel Berbintang & Non Bintang Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan gambar diatas mengindikasikan bahwa potensi pengelolaan dan pembangunan pada sektor pariwisata perlu terus dilakukan agar dapat meningkatkan daya tarik para wisatawan sehingga bisa menjadi salah satu sumber devisa atau pendapatan daerah. T. Christie and Alizabeth Crompton (2003.63) dalam (Aeni & Astuti, 2019) menyebutkan bahwa “Sektor pariwisata merupakan *tools* (alat) yang sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah, menciptakan pola hubungan yang saling terkait dengan sektor produksi, sektor jasa dan diversifikasi ekonomi”.

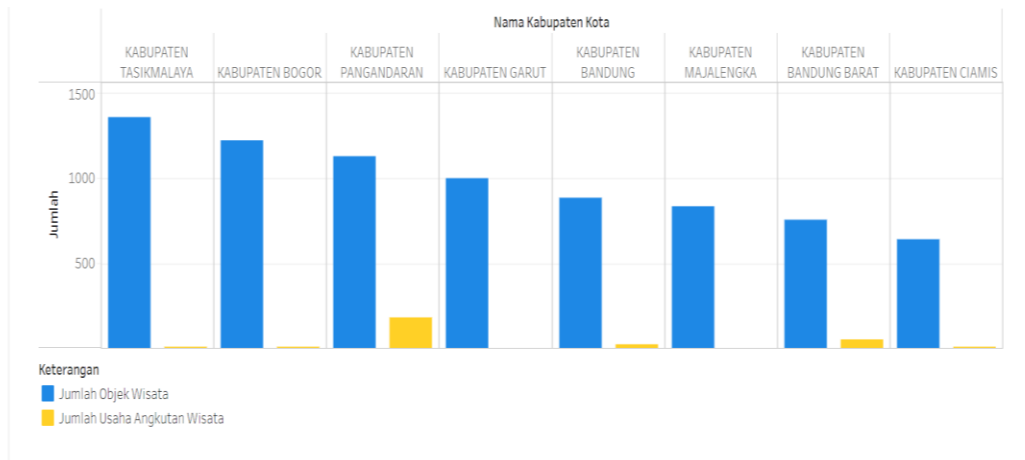
Beberapa alasan di atas telah memberikan gambaran terkait pentingnya pemanfaatan pariwisata untuk mendorong sektor perekonomian suatu daerah. Untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan mampu memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh karena didalam proses pembangunan dan pengembangan sektor

pariwisata diperlukan proses kerjasama atau kemitraan dengan berbagai *stakeholder* baik yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan swasta yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah wisata.

Maju mundurnya kepariwisataan yang dimiliki oleh sebuah Negara tidak akan terlepas dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah harus terus melakukan pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata terlebih dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki Indonesia yang sangat besar untuk mampu berkontribusi terhadap ekonomi negara dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam adalah Provinsi Jawa Barat baik dari segi pasar wisatawan ataupun produk wisata dengan kuantitas yang cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2022 berdasarkan pada *Jabar Data Viz Festival (JDVF)* Provinsi Jawa Barat didominasi oleh wisata alam dengan kuantitas mencapai 53,7%, Wisata Budaya sebesar 21,90%, Wisata Buatan sebesar 19,45% dan Wisata minat khusus sebesar 4,94% dan merupakan objek pariwisata tetap yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan demikian potensi pariwisata yang dimiliki tersebut perlu terus diolah dan digali agar lebih optimal. Potensi objek wisata tertinggi di Provinsi Jawa Barat tertinggi terdapat di Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 1.354 objek wisata sebagaimana grafik dibawah.

Grafik 1.4 Grafik objek wisata tiap daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : opendata.jabarprov.go.id

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi pertama dengan jumlah objek wisata tertinggi sebagaimana gambar yang di tunjukan dengan warna biru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi antara potensi pariwisata dengan jumlah usaha angkutan pariwisata yang ada memiliki ketimpangan yang sangat jauh dimana usaha angkutan yang hanya 9 jumlah usaha angkutan wisata yang dimiliki hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada gambar yang berwarna kuning.

Angkutan wisata tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pangandaran dengan total 180 jumlah angkutan wisata yang menjadi wisata populer di Jawa Barat. Adapun Objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah wisata alam seperti Tonjong Canyon, Karaha Bodas, Pantai Karangtawulan, Pantai Sindangkerta, pantai pamayang, Curug Dengdeng, Danau Lemona, Pasir Kirisik, Curug Badak, dan Cagar Alam Gunung Galunggung Wisata Budaya seperti Kampung Naga dan kampung kreatif sukaruas, sedangkan untuk wisata religinya adalah Pamijahan dan lain sebagainya.

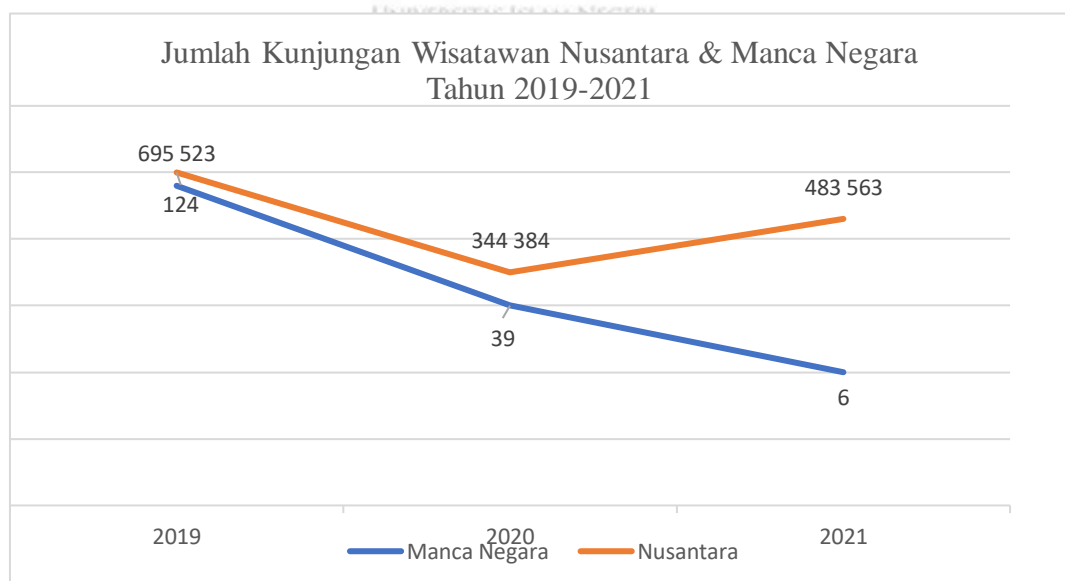
Selain terkenal dengan wisata alamnya Kabupaten Tasikmalaya juga terkenal dengan wisata budaya dan religinya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kehidupan dari sosial budaya masyarakat sunda yang sangat melekat pada segenap lingkungan kehidupan masyarakatnya. Adapun objek wisata budaya

yang ada adalah Kampung Naga yang mana masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih mempertahankan budaya Sunda dan ajaran leluhur mereka sehingga budaya sunda sangat melekat pada masyarakatnya.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah bagian dari Provinsi Jawa Barat dimana secara astronomis Kabupaten Tasikmalaya terletak pada 107,54,10-108,25,52⁰ BT sampai dengan 7,02-7,49⁰ LS. Sedangkan secara geografis Kabupaten Tasikmalaya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten ciamis dan Kabupaten Pangandaran, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan salah satu kabupaten dimana pariwisata yang dimilikinya cukup potensial untuk dikunjungi oleh para wisatawan hal ini dikarenakan terletak di jalur selatan rute *overland* Jawa Barat yang dilalui oleh jalan utama lintas tengah provinsi dari barat ke timur. (BAPPEDA, 2017) Namun demikian jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami penurunan sebagaimana berikut ini.

Grafik 1.5 Grafik Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara 2019-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya 2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan objek wisata secara bertahap selaras dengan apa yang menjadi program nasional. Bupati Tasikmalaya Ade Sugiarto mengatakan akan terus berkomitmen untuk menjadikan sektor pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu sektor strategis dan unggulan di daerah dan menjadi media integrasi program lintas sektor pembangunan. pariwisata dan budaya sebagai *leading* pembangunan yang mampu untuk mendorong ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata dalam perkembangannya merupakan bagian dari implementasi pembangunan dari seluruh sektor baik pembangunan pada infrastruktur, ekonomi kreatif, perdagangan, pertanian serta sektor lainnya ikut terlibat dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata agar mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Adapun tahapan pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan meyakinkan seluruh masyarakat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan atau pengembangan pola kebijakan yang mampu untuk mendorong perekonomian daerah serta membuka lapangan kerja, pada tahapan berikutnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai melakukan pembenahan fisik dengan melakukan berbagai pembenahan akses menuju tempat wisata yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung wisata serta untuk menata ruang objek wisata sehingga lebih indah dan lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini ditujukan agar mampu mendorong lebih banyak wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya sehingga visi Provinsi Jawa Barat sebagai wisata kelas dunia dapat terwujud. Namun demikian untuk mampu mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa hanya seorang diri untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dimilikinya dengan berbagai keterbatasan yang ada dan harus melibatkan *stakeholder* yang lainnya.

Pada praktiknya, dalam upaya untuk melakukan pengembangan-pengembangan terhadap sektor wisata di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Riview Dokumen Rencana Kerja Stratratregis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Tasikmalaya pada perubahan dokumen tahun 2021 turut mengalami beberapa kendala diantaranya adalah jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada, belum optimalnya akses didalam melakukan pemasaran dan belum memiliki jaringan pemasaran baik kedalam maupun keluar negeri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media promosi dan informasi kepariwisataan belum dimaksimalkan dengan baik, masih belum terkelolanya kelembangaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat yang berkelanjutan masih belum optimal, sinergitas antar instransi perangkat daerah yang menangani sektor pariwisata yang dilakukan secara holistik belum terbangun dengan optimal dan masih belum terjalannya kerjasama yang dilakukan antar pelaku ekonomi kreatif baik komunitas dan masyarakat dengan para pelaku jasa usaha pariwisata baik hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya yang berakibat pada masih belum dirasakannya peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata oleh masyarakat.

Adanya berbagai permasalahan yang menghambat berjalannya tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya untuk menjalankan pemerintahan dan pemberian layanan dari perangkat daerah kepada masyarakat, maka secara tidak langsung akan berdampak signifikan dalam pencapaian visi dan misi dari kepala daerah provinsi dan program stratregis nasional.

Sebuah hal yang sangat penting untuk dicermati dalam pengembangan konsep pariwisata yang ada di sebuah daerah hendaknya harus selalu berdasarkan pada kondisi dan situasi aktual dimana daerah wisata tersebut berada. Hal ini umum dikenal sebagai *contextual related* yang terbentuk berdasarkan letak daerah wisata yang ada pada sebuah daerah, kepentingan masa depan, bisnis, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Apabila upaya pengembangan yang dilakukan tidak berladaskan pada hal-hal tersebut maka ditakutkan pengembangan sektor

pariwisata sebagai sebuah implementasi pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi akan berjalan sendiri dengan tanpa adanya dukungan dari sektor-sektor yang lain, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dalam keberlanjutan (*sustainability*) pada sektor pariwisata tersebut.

Salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Tasikmalaya adalah objek wisata Gunung Galunggung dimana secara administratif kawasan gunung Galunggung terbagi menjadi dua kewenangan yaitu Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, secara geografis yang dikelola oleh Perum Perhutani adalah kawasan hutan dan yang dikelola oleh pemerintah adalah kawasan lereng Gunung Galunggung. Ditinjau dari segi pariwisata kawasan hutan dan lereng Gunung Galunggung memiliki potensi pariwisata yang dapat menarik minat para wisatawan diantaranya: *Galunggung view deck*, curug agung, kawah Gunung Galunggung, kolam pemandian air panas dan sungai pemandian air panas dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan berbagai upaya pengembangan pariwisata sejalan dengan yang disarankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pedoman pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan. Peraturan ini menjadi rujukan bagi setiap daerah untuk melakukan pengembangan wisata yang dimilikinya. Model *collaborative* ini telah sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk melahirkan inovasi-inovasi di dalam upaya untuk mengembangkan pariwisata.

Inovasi yang dilakukan diantara adalah dengan dibuatnya *memorandum of understanding* antara perhutani sebagai pengelola wisata Gunung Galunggung dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 974/362/Disparpub/2014 tentang tentang pemungutan retribusi dan karcis untuk masuk ke Gunung Galunggung Tasikmalaya. Dengan adanya MoU tersebut pemerintah berharap dapat terus melakukan berbagai upaya pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya sehingga lebih optimal dan dapat

memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait pengembangan pariwisata.

Kerja sama tersebut diselenggarakan atas dasar keputusan Menteri Negara Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56/BH/KDK.10.15/VIII/2000. Yang kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Indonesia No. 72 tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pasal 3 ayat 5 menjelaskan bahwa pengelolaan hutan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan mengusung judul yaitu “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali informasi terkait kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan perum perhutani dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata Gunung Galunggung.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada temuan peneliti di Lapangan dan berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas pariwisata serta merujuk pada hasil review rencana kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang sudah dicantumkan dibagian latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya masih belum dikelola dengan optimal.
2. Masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan fasilitas dan aksesibilitas terhadap destinasi wisata yang belum memadai
3. Pemberdayaan terhadap masyarakat-masyarakat sekitar objek wisata masih kurang optimal sehingga perlu adanya kerjasama diantara beberapa pihak atau beberapa *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata.

4. Sumber daya manusia yang terbatas dan masih rendahnya kompetensi pegawai berdampak pada pengembangan pariwisata yang belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penyelenggaraan *collaborative governance* yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara dalam membangun pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana struktur jaringan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana komitmen terhadap tujuan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana kepercayaan antar *stakeholder* dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
4. Bagaimana *governance* dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
5. Bagaimana akses terhadap kekuasaan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
6. Bagaimana pembagian akuntabilitas dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?

7. Bagaimana berbagi informasi dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?
8. Bagaimana akses terhadap sumber daya dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui struktur jaringan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui komitmen terhadap tujuan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kepercayaan antar *stakeholder* dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui *governance* dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
5. Untuk mengetahui akses terhadap kekuasaan dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
6. Untuk mengetahui pembagian akuntabilitas dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.
7. Untuk mengetahui berbagi informasi dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

8. Untuk mengetahui akses terhadap sumber daya manusia dalam *collaborative governance* untuk pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Dilaksankannya penelitian ini maka diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat teoretis dan manfaat praktis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu administrasi publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong dan memberikan teori-teori terkait dengan pengembangan sektor pariwisata ditinjau *collaborative governance*. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan penelitian yang serupa untuk dikemudian hari.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi segenap lembaga yang terlibat dalam proses *collaborative governance ini*. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti untuk memahami konsep *collaborative governance* yang dilakukan antar lintas *stakeholder* yang terlibat untuk mengembangkan Pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Sugiyono (2014; 54) mengemukakan bahwa penelitian yang berjenis kualitatif memiliki penentuan fokus penelitian berdasarkan pada tingkat kebaruan atas informasi yang akan diperoleh pada situasi Lapangan (situasi sosial). Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fisibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor keterbatasan tenaga dana dan waktu. Fokus penelitian merupakan sebuah faktor

yang sangat penting guna menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian dengan fokus penelitian ini maka peneliti dapat menentukan kemana arah penelitian yang akan dilakukannya. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat sejauh mana keberhasilan *Collaborative Governance* dalam pengembangan sektor pariwisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya adalah Objek Pariwisata Gunung Galunggung yang membutuhkan pengelolaan lebih optimal. Merespons hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkolaborasi dengan Perhutani untuk mengelola Pariwisata Gunung Galunggung.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep *collaborative governance* semakin terus berkembang karena adanya saling ketergantungan diantara instansi-instansi dalam menangani segenap permasalahan publik yang cukup sulit untuk ditasi oleh pemerintah saja, sehingga perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kolaborasi lintas *stake holder* dengan demikian permasalahan- permasalahan publik dapat diatasi. Adapun permasalahan di dalam penelitian adalah :

1. Banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya masih belum dikelola dengan optimal.
2. Masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan fasilitas dan aksesibilitas terhadap destinasi wisata yang belum memadai
3. Pemberdayaan terhadap masyarakat-masyarakat sekitar objek wisata masih kurang optimal sehingga perlu adanya kerjasama diantara beberapa pihak atau beberapa *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata.
4. Sumber daya manusia yang terbatas dan masih rendahnya kompetensi pegawai berdampak pada pengembangan pariwisata yang belum optimal.

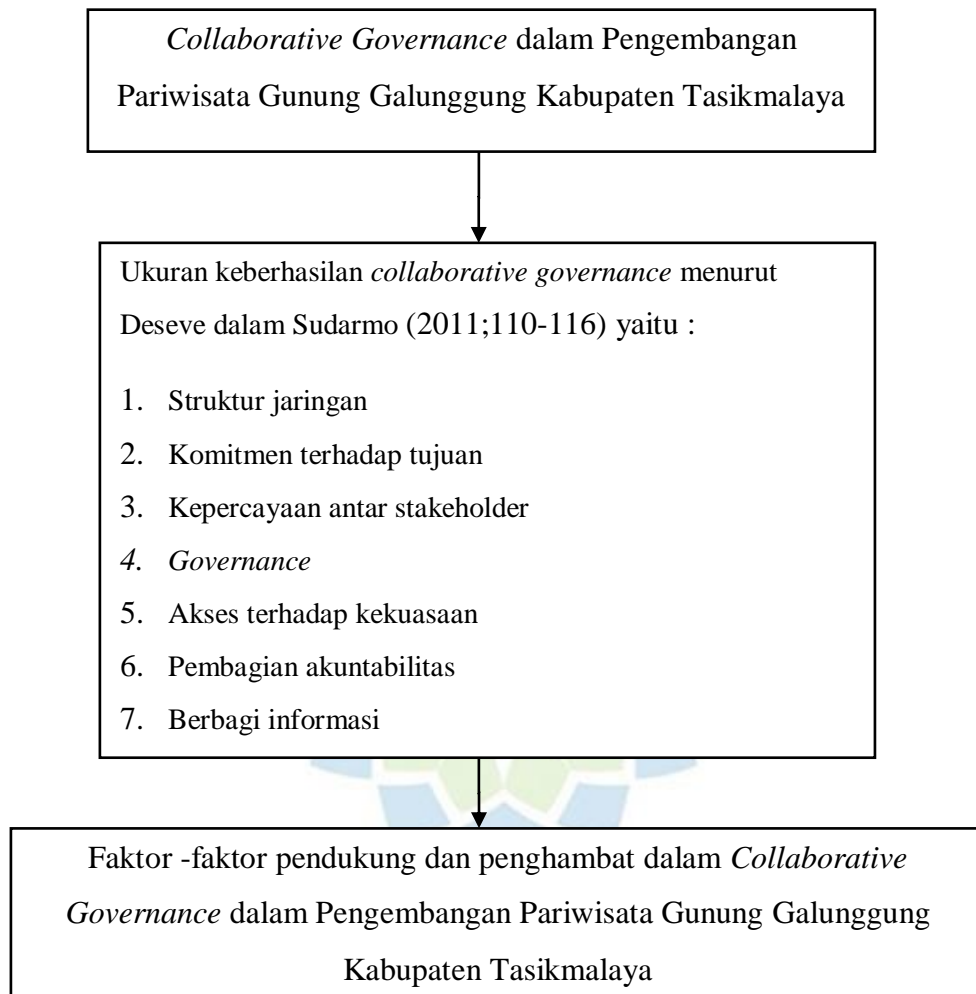
Penelitian ini akan menguraikan keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata dengan melihat beberapa variabel faktor-faktor

keberhasilan penyelenggaraan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Deseve dalam Sudarmo (2011;110-116) bahwa terdapat 8 faktor yang dapat menilai apakah pelaksanaan *collaborative governance* yang telah dilakukan pemerintah bisa disebut berhasil atau gagal yakni:

1. Struktur jaringan/*network structure*
2. Komitmen bersama terhadap tujuan/*comitment to a common purpose*
3. Kepercayaan/*trust the participants* (adanya saling percaya antar stakeholder dalam jaringan)
4. *Governance* (termasuk adanya saling percaya antar stakeholder, adanya batas-batas yang boleh terlibat dan yang tidak boleh terlibat dan adanya aturan main yang disepakati bersama, dan kebebasan untuk menentukan arah kolaborasi)
5. Akses terhadap kekuasaan/*acces to authority*
6. Pembagian akuntabilitas/*distributive accountability*
7. Berbagi informasi/*information shering*
8. Akses terhadap sumber daya/*access to reources*

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dalam *collaborative governance*. Dengan adanya kolaborasi antar beberapa *stakeholder* maka diharapkan Pariwisata Gunung Galunggung dapat lebih berkembang dan memiliki daya tarik dari Kabupaten Tasikmalaya. Adapun rumusan rumusan masalah penelitian, tujuan dilaksanakannya penelitian dan kajian teori yang dilakukan akan diuraikan dalam skema kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1 Kerangka berpikir



Sumber: Diolah peneliti

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG